



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar harga satuan pokok kegiatan;
- b. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
7. Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat HST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) HSPK digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan elemen

penyusun sebagai berikut:

- a. Standar Satuan Harga; dan
 - b. Standar Biaya Umum.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. harga dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. harga tanpa menggunakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

- (1) Penyusunan HSPK didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa di wilayah perkotaan di Provinsi Papua Barat.
- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan tambahan angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu, terhadap HSPK dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel, dan efisien
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi memaksa, kedaruratan, dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal komponen HSPK yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen HSPK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan komponen HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rekomendasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta data dukung usulan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen HSPK.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan komponen HSPK

yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah;
- b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi.
- c. penambahan jenis komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini; dan/atau
- d. terdapat sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) HSPK terkait dengan HST BGN, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) HSPK terkait dengan HST PRN, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HSPK terkait dengan Harga Satuan Tertinggi RLH Orang Asli Papua, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HSPK terkait dengan HST PRBGN, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) HSPK terkait dengan HST PBGN rumah negara, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) HSPK terkait dengan PKB PBGN, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) HSPK terkait dengan SPAM tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) HSPK terkait dengan PJJ, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) HSPK terkait dengan Pekerjaan Bangunan Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pengamanan Abrasi Pantai tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) HSPK terkait dengan Pembangunan Jalan Lingkungan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (11) HSPK terkait dengan Sanitasi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) HSPK terkait dengan Pembangunan Pagar dan Kandang Ternak, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) HSPK terkait dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) HSPK terkait dengan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) HSPK terkait dengan ASDP dan Kepelabuhanan, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) HSPK terkait dengan Perkeretaapian, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) HSPK terkait dengan Kebandarudaraan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) HSPK terkait dengan Jasa Konsultansi, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) HSPK terkait dengan Ketenagalistrikan, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) HSPK terkait dengan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) HSPK terkait dengan Jaringan Internet dan Website, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) HSPK terkait dengan Pengadaan Peralatan Utama SMK dan SMA, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (23) HSPK terkait dengan Perangkat Laboratorium Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA SKPD Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 34.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorisinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HST BGN)
TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N					
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		PAGAR GEDUNG NEGARA PER METER			JALAN LINGKUNGAN L=4 M ;T=20 CM ;K-300 PER M' (Rp)
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	DEPAN (M')	BELAKANG (M')	SAMPING (M')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA						
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 9,355,000	Rp 8,286,000	Rp 3,920,000	Rp 3,160,000	Rp 2,990,000	Rp 3,400,000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 9,030,000	Rp 8,211,000	Rp 3,920,000	Rp 3,030,000	Rp 2,860,000	Rp 3,294,000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 11,540,000	Rp 9,910,000	Rp 4,970,000	Rp 4,410,000	Rp 4,170,000	Rp 5,067,000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 10,270,000	Rp 8,750,000	Rp 4,340,000	Rp 3,770,000	Rp 3,580,000	Rp 3,970,000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 14,110,000	Rp 11,390,000	Rp 5,870,000	Rp 5,830,000	Rp 5,510,000	Rp 8,200,000
	WILAYAH SORONG RAYA						
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 9,000,000	Rp 7,850,000	Rp 3,820,000	Rp 2,990,000	Rp 2,840,000	Rp 3,135,000
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 9,200,000	Rp 8,300,000	Rp 4,210,000	Rp 3,250,000	Rp 3,080,000	Rp 3,040,000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 12,230,000	Rp 10,300,000	Rp 5,040,000	Rp 4,510,000	Rp 4,310,000	Rp 6,300,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 9,830,000	Rp 9,210,000	Rp 4,390,000	Rp 3,740,000	Rp 3,550,000	Rp 3,770,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 9,820,000	Rp 9,470,000	Rp 4,290,000	Rp 3,560,000	Rp 3,340,000	Rp 3,930,000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 12,230,000	Rp 11,120,000	Rp 5,130,000	Rp 4,690,000	Rp 4,460,000	Rp 5,259,000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA						
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 12,560,000	Rp 10,030,000	Rp 5,140,000	Rp 4,720,000	Rp 4,430,000	Rp 6,200,000

13	KABUPATEN KAIMANA. - KAIMANA	Rp 10,110,000	Rp 8,710,000	Rp 4,280,000	Rp 3,540,000	Rp 3,350,000	Rp 4,320,000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV, b)
NIP. 19560705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA (HST PRN)
TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN										
		RUMAH NEGARA								PAGAR RUMAH NEGARA PER METER		
		TYPE A = 250 M2 PER M2	TYPE A = 250 M2 PER UNIT	TYPE B = 120 M2 PER M2	TYPE B = 120 M2 PER UNIT	TYPE C = 70 M2 TYPE D = 50 M2 TYPE E = 36 M2	TYPE C = 70 M2 PER UNIT	TYPE D = 50 M2 PER UNIT	TYPE E = 36 M2 PER UNIT	DEPAN (M')	BELAKANG (M')	SAMPING (M')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA											
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 9,412,000	Rp 2,353,000,000	Rp 9,316,600	Rp 1,117,992,000	Rp 6,263,500	Rp 438,445,000	Rp 313,175,000	Rp 225,486,000	Rp 3,610,000	Rp 2,020,000	Rp 1,880,000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 8,950,600	Rp 2,237,500,000	Rp 9,010,000	Rp 1,081,200,000	Rp 6,761,400	Rp 473,298,000	Rp 338,070,000	Rp 243,410,400	Rp 3,670,000	Rp 1,960,000	Rp 1,830,000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 10,990,000	Rp 2,747,500,000	Rp 11,030,000	Rp 1,323,600,000	Rp 7,830,000	Rp 548,100,000	Rp 391,500,000	Rp 281,880,000	Rp 4,450,000	Rp 2,910,000	Rp 2,690,000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 9,770,000	Rp 2,442,500,000	Rp 9,810,000	Rp 1,177,200,000	Rp 6,930,000	Rp 485,100,000	Rp 346,500,000	Rp 249,480,000	Rp 3,940,000	Rp 2,440,000	Rp 2,290,000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 14,112,000	Rp 3,528,000,000	Rp 13,520,000	Rp 1,622,400,000	Rp 10,875,000	Rp 761,250,000	Rp 543,750,000	Rp 391,500,000	Rp 5,180,000	Rp 3,900,000	Rp 3,560,000
	WILAYAH SORONG RAYA											
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 9,130,000	Rp 2,282,500,000	Rp 9,110,000	Rp 1,093,200,000	Rp 6,028,500	Rp 421,995,000	Rp 301,425,000	Rp 217,026,000	Rp 3,510,000	Rp 1,870,000	Rp 1,760,000
7	KABUPATEN SORONG - A'IMAS	Rp 9,570,000	Rp 2,392,500,000	Rp 9,740,000	Rp 1,168,800,000	Rp 6,365,000	Rp 448,550,000	Rp 318,250,000	Rp 229,140,000	Rp 3,850,000	Rp 2,040,000	Rp 1,900,000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 11,600,000	Rp 2,900,000,000	Rp 11,820,000	Rp 1,418,400,000	Rp 7,690,000	Rp 538,300,000	Rp 384,500,000	Rp 276,840,000	Rp 4,490,000	Rp 2,900,000	Rp 2,750,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 10,440,000	Rp 2,610,000,000	Rp 10,540,000	Rp 1,264,800,000	Rp 6,870,000	Rp 480,900,000	Rp 343,500,000	Rp 247,320,000	Rp 4,070,000	Rp 2,450,000	Rp 2,310,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 10,470,000	Rp 2,617,500,000	Rp 10,680,000	Rp 1,281,600,000	Rp 7,042,000	Rp 492,940,000	Rp 352,100,000	Rp 253,512,000	Rp 3,970,000	Rp 2,320,000	Rp 2,140,000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 12,260,000	Rp 3,065,000,000	Rp 12,560,000	Rp 1,507,200,000	Rp 8,040,000	Rp 562,800,000	Rp 402,000,000	Rp 289,440,000	Rp 4,600,000	Rp 3,080,000	Rp 2,890,000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA											
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 11,850,000	Rp 2,962,500,000	Rp 11,950,000	Rp 1,434,000,000	Rp 8,140,000	Rp 569,800,000	Rp 407,000,000	Rp 293,040,000	Rp 4,640,000	Rp 3,150,000	Rp 2,890,000
13	KABUPATEN KAIMANA - KAIMANA	Rp 10,060,000	Rp 2,515,000,000	Rp 10,360,000	Rp 1,243,200,000	Rp 7,142,800	Rp 499,996,000	Rp 357,140,000	Rp 257,140,800	Rp 3,950,000	Rp 2,280,000	Rp 2,130,000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BIRU HUKUM,

Dorsinta R. Hutabarat, SH, MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Dr. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**HARGA SATUAN TERTINGGI RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP
TAHUN 2023**

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N	
		RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER M2	RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER UNIT
	WILAYAH MANOKWARI RAYA		
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 6,263,500	Rp 281,857,500
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 6,761,400	Rp 304,263,000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 7,830,000	Rp 352,350,000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 6,930,000	Rp 311,850,000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 10,875,000	Rp 489,375,000
	WILAYAH SORONG RAYA		
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 6,028,500	Rp 271,282,500
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 6,365,000	Rp 286,425,000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 7,690,000	Rp 346,050,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 6,870,000	Rp 309,150,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 7,042,000	Rp 316,890,000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 8,040,000	Rp 361,800,000

	WILAYAH DOOMBERAY RAYA		
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 8,140,000	Rp 366,300,000
13	KABUPATEN KAIMANA. - KAIMANA	Rp 7,142,800	Rp 321,426,000

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (V/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2023

NO	KABUPATEN / KOTA	PEMELIHARAAN RUTIN PER TAHUN								
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT					PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2		
	WILAYAH MANOKWARI RAYA									
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 187,100	Rp 165,720	Rp 47,060,000	Rp 186,332	Rp 8,768,900	Rp 6,263,500	Rp 4,509,720	Rp 78,400	Rp 72,200
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 180,600	Rp 164,220	Rp 44,750,000	Rp 180,200	Rp 9,465,960	Rp 6,761,400	Rp 4,868,208	Rp 78,400	Rp 73,400
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 230,800	Rp 198,200	Rp 54,950,000	Rp 220,600	Rp 10,962,000	Rp 7,830,000	Rp 5,637,600	Rp 99,400	Rp 89,000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 205,400	Rp 175,000	Rp 48,850,000	Rp 196,200	Rp 9,702,000	Rp 6,930,000	Rp 4,989,600	Rp 86,800	Rp 78,800
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 282,200	Rp 227,800	Rp 70,560,000	Rp 270,400	Rp 15,225,000	Rp 10,875,000	Rp 7,830,000	Rp 117,400	Rp 103,600
	WILAYAH SORONG RAYA									
6	KOTA SORONG	Rp 180,000	Rp 157,000	Rp 45,650,000	Rp 182,200	Rp 8,439,900	Rp 6,028,500	Rp 4,340,520	Rp 76,400	Rp 70,200
7	KABUPATEN SORONG	Rp 184,000	Rp 166,000	Rp 47,850,000	Rp 194,800	Rp 8,911,000	Rp 6,365,000	Rp 4,582,800	Rp 84,200	Rp 77,000
8	KABUPATEN SOSORNG SELATAN	Rp 244,600	Rp 206,000	Rp 58,000,000	Rp 236,400	Rp 10,766,000	Rp 7,690,000	Rp 5,536,800	Rp 100,800	Rp 89,800
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 196,600	Rp 184,200	Rp 52,200,000	Rp 210,800	Rp 9,618,000	Rp 6,870,000	Rp 4,946,400	Rp 87,800	Rp 81,400
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 196,400	Rp 189,400	Rp 52,350,000	Rp 213,600	Rp 9,858,800	Rp 7,042,000	Rp 5,070,240	Rp 85,800	Rp 79,400
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 244,600	Rp 222,400	Rp 61,300,000	Rp 251,200	Rp 11,256,000	Rp 8,040,000	Rp 5,788,800	Rp 102,600	Rp 92,000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA									
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 251,200	Rp 200,600	Rp 59,250,000	Rp 239,000	Rp 11,396,000	Rp 8,140,000	Rp 5,860,800	Rp 102,800	Rp 92,800
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 202,200	Rp 174,200	Rp 50,300,000	Rp 207,200	Rp 9,999,920	Rp 7,142,800	Rp 5,142,816	Rp 85,600	Rp 79,000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,


Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

HARGA SATUAN TERTINGGI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - RUMAH NEGARA
TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN RINGAN (MAX KERUSAKAN 35%)									
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT					PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')	
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2			
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 3,274,250	Rp 2,900,100	Rp 823,550,000	Rp 391,297,200	Rp 153,455,750	Rp 109,611,250	Rp 78,920,100	Rp 1,372,000	Rp 1,263,500	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 3,160,500	Rp 2,873,850	Rp 783,125,000	Rp 378,420,000	Rp 165,654,300	Rp 118,324,500	Rp 85,193,640	Rp 1,372,000	Rp 1,284,500	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 4,039,000	Rp 3,468,500	Rp 961,625,000	Rp 463,260,000	Rp 191,835,000	Rp 137,025,000	Rp 98,658,000	Rp 1,739,500	Rp 1,557,500	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 3,594,500	Rp 3,062,500	Rp 854,875,000	Rp 412,020,000	Rp 169,785,000	Rp 121,275,000	Rp 87,318,000	Rp 1,519,000	Rp 1,379,000	
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 4,938,500	Rp 3,986,500	Rp 1,234,800,000	Rp 567,840,000	Rp 266,437,500	Rp 190,312,500	Rp 137,025,000	Rp 2,054,500	Rp 1,813,000	
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp 3,150,000	Rp 2,747,500	Rp 798,875,000	Rp 382,620,000	Rp 147,698,250	Rp 105,498,750	Rp 75,959,100	Rp 1,337,000	Rp 1,228,500	
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp 3,220,000	Rp 2,905,000	Rp 837,375,000	Rp 409,080,000	Rp 155,942,500	Rp 111,387,500	Rp 80,199,000	Rp 1,473,500	Rp 1,347,500	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp 4,280,500	Rp 3,605,000	Rp 1,015,000,000	Rp 496,440,000	Rp 188,405,000	Rp 134,575,000	Rp 96,894,000	Rp 1,764,000	Rp 1,571,500	
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp 3,440,500	Rp 3,223,500	Rp 913,500,000	Rp 442,680,000	Rp 168,315,000	Rp 120,225,000	Rp 86,562,000	Rp 1,536,500	Rp 1,424,500	
10	KABUPATEN TAMBORAUW - IBUKOTA	Rp 3,437,000	Rp 3,314,500	Rp 916,125,000	Rp 448,560,000	Rp 172,529,000	Rp 123,235,000	Rp 88,729,200	Rp 1,501,500	Rp 1,389,500	
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp 4,280,500	Rp 3,892,000	Rp 1,072,750,000	Rp 527,520,000	Rp 196,980,000	Rp 140,700,000	Rp 101,304,000	Rp 1,795,500	Rp 1,610,000	
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp 4,396,000	Rp 3,510,500	Rp 1,036,875,000	Rp 501,900,000	Rp 199,430,000	Rp 142,450,000	Rp 102,564,000	Rp 1,799,000	Rp 1,624,000	
13	KABUPATEN KAIMANA - IBUKOTA	Rp 3,538,500	Rp 3,048,500	Rp 880,250,000	Rp 435,120,000	Rp 174,998,600	Rp 124,999,000	Rp 89,999,280	Rp 1,498,000	Rp 1,382,500	

[illegible]

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN BERAT (MAX KERUSAKAN 65%)								PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT							
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2			
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 6.080,750	Rp 5.385,900	Rp 1.529,450,000	Rp 726,694,800	Rp 284,989,250	Rp 203,563,750	Rp 146.565,900	Rp -	Rp -	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 5.869,500	Rp 5.337,150	Rp 1,454,375,000	Rp 702,780,000	Rp 307,643,700	Rp 219,745,500	Rp 158.216,760	Rp -	Rp -	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 7.501,000	Rp 6.441,300	Rp 1,785,875,000	Rp 860,340,000	Rp 356,265,000	Rp 254,475,000	Rp 183.222,000	Rp -	Rp -	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 6,675,500	Rp 5,687,500	Rp 1,587,625,000	Rp 765,180,000	Rp 315,315,000	Rp 225,225,000	Rp 162,162,000	Rp -	Rp -	
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARPAK - IBUKOTA	Rp 9,171,500	Rp 7,403,500	Rp 2,293,200,000	Rp 1,054,560,000	Rp 494,812,500	Rp 353,437,500	Rp 254,475,000	Rp -	Rp -	
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp 5,850,000	Rp 5,102,500	Rp 1,483,625,000	Rp 710,580,000	Rp 274,296,750	Rp 195,926,250	Rp 141,066,900	Rp -	Rp -	
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp 5,980,000	Rp 5,395,000	Rp 1,555,125,000	Rp 739,720,000	Rp 289,607,500	Rp 206,862,500	Rp 148,941,000	Rp -	Rp -	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp 7,949,500	Rp 6,695,000	Rp 1,885,000,000	Rp 921,960,000	Rp 349,895,000	Rp 249,925,000	Rp 179,946,000	Rp -	Rp -	
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp 6,389,500	Rp 5,986,500	Rp 1,696,500,000	Rp 822,120,000	Rp 312,585,000	Rp 223,275,000	Rp 160,758,000	Rp -	Rp -	
10	KABUPATEN TAMBRAUW - IBUKOTA	Rp 6,383,000	Rp 6,155,500	Rp 1,701,375,000	Rp 833,040,000	Rp 320,411,000	Rp 228,865,000	Rp 164,782,800	Rp -	Rp -	
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp 7,949,500	Rp 7,228,000	Rp 1,992,250,000	Rp 979,680,000	Rp 365,820,000	Rp 261,300,000	Rp 188,136,000	Rp -	Rp -	
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp 8,164,000	Rp 6,519,500	Rp 1,925,625,000	Rp 932,100,000	Rp 370,370,000	Rp 264,550,000	Rp 190,476,000	Rp -	Rp -	
13	KABUPATEN KAIMANA - IBUKOTA	Rp 6,571,500	Rp 5,661,500	Rp 1,634,750,000	Rp 808,080,000	Rp 324,997,400	Rp 232,141,000	Rp 167,141,520	Rp -	Rp -	

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Ptl. KEPALA BUREAU HUKUM

Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., MM
 PEMBINA Tk. I (IV/b)
 NIP. 19660705 199201 8 002

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

**PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2023**

KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.10	10.10 sd 8.00	8.00 sd 6.30	6.30 sd 4.80	4.80 sd 3.70	3.70 sd 2.80	2.80 sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	12.40	12.40 sd 9.80	9.80 sd 7.72	7.72 sd 6.30	6.30 sd 5.10	5.10 sd 4.00	4.00 sd 3.10	3.10 sd 2.40	2.40 sd 1.90	1.90 sd 1.50	1.50 sd 1.36	1.36
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.60	14.60 sd 10.47	10.47 sd 7.07	7.07 sd 4.40	4.40 sd 2.97	2.97 sd 1.98	1.98 sd 1.25	1.25 sd 0.83	0.83 sd 0.56	0.56 sd 0.37	0.37 sd 0.26	0.26

KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd 16.40	16.40 sd 13.50	13.50 sd 11.10	11.10 sd 9.10	9.10 sd 7.30	7.30 sd 5.80	5.80 sd 4.60	4.60 sd 3.64	3.64 sd 3.80	3.80 sd 2.32	2.32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	18.35	18.35 sd 15.19	15.19 sd 12.50	12.50 sd 10.28	10.28 sd 8.30	8.30 sd 6.76	6.76 sd 5.37	5.37 sd 4.26	4.26 sd 3.37	3.37 sd 2.59	2.59 sd 2.15	2.15
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	14.20	14.20 sd 11.75	11.75 sd 9.67	9.67 sd 7.95	7.95 sd 6.52	6.52 sd 5.23	5.23 sd 4.15	4.15 sd 3.29	3.29 sd 2.60	2.60 sd 2.00	2.00 sd 1.66	1.66
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 8.21	8.21 sd 5.92	5.92 sd 4.43	4.43 sd 2.90	2.90 sd 1.92	1.92 sd 1.26	1.26 sd 0.72	0.72 sd 0.42	0.42 sd 0.28	0.28

KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	22.00	22.00 sd	18.20 sd	15.16 sd	12.50 sd	10.24 sd	8.20 sd	6.50 sd	5.10 sd	4.00 sd	3.15 sd	2.75
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd	16.50 sd	13.60 sd	11.20 sd	9.10 sd	7.20 sd	5.60 sd	4.30 sd	3.30 sd	2.60 sd	2.30
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd	11.25 sd	8.21 sd	5.92 sd	4.43 sd	2.90 sd	1.92 sd	1.26 sd	0.72 sd	0.42 sd	0.28

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,

Dorsinta R. Hutabarat
Dorsinta R. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 3 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	PENGEMBANGAN PERPIPAAN PER 1 M'	PEMBANGUNAN RESERVOIR 9 M3	PEMBANGUNAN BRONGKAPTERING 8,5 M3	KETERANGAN
WILAYAH MANOKWARI RAYA					
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 706,000	Rp 329,144,809	Rp 36,373,187	PIPA HDPE DIA. 6"
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 968,000	Rp 324,260,942	Rp 36,167,135	PIPA HDPE DIA. 6"
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 484,000	Rp 335,105,461	Rp 36,581,444	PIPA HDPE DIA. 4"
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 861,000	Rp 335,000,000	Rp 363,620,233	PIPA HDPE DIA. 6"
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 448,629	Rp 336,430,875	Rp 36,703,772	
WILAYAH SORONG RAYA					
6	KOTA SORONG	Rp 447,902	Rp 326,349,280	Rp 36,212,035	
7	KABUPATEN SORONG	Rp 446,181	Rp 310,140,778	Rp 34,404,511	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 511,000	Rp 339,208,713	Rp 36,797,760	PIPA HDPE DIA. 6"
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 447,990	Rp 326,625,351	Rp 36,318,745	
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 527,000	Rp 325,019,128	Rp 36,285,555	PIPA HDPE DIA. 6"
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 511,000	Rp 339,501,955	Rp 36,844,713	PIPA HDPE DIA. 6"
WILAYAH DOOMBERAY RAYA					
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 1,015,000	Rp 336,430,875	Rp 36,703,772	PIPA HDPE DIA. 6"
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 815,000	Rp 320,563,564	Rp 36,118,219	PIPA HDPE DIA. 4"

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEKERJAAN JALAN JEMBATAN TAHUN 2023

NO	PEKERJAAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1	Pembangunan Jalan - MKW RAYA	Konstruksi Dengan Timbunan Pilihan	Km	3,000,000,000
2	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan Lapen	Km	3,500,000,000
3	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan HRS	Km	5,000,000,000
4	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan Rigid	Km	8,000,000,000
5	Rehabilitasi Jalan - MKW RAYA	(Rehabilitasi Pada Permukaan)	Km	3,500,000,000
6	Pembangunan Box Culvert	Termasuk Timbunan oprit dan Perkerasan Diatasnya	Unit	1,000,000,000
7	Pembangunan Plat Dekker	Termasuk Perkerasan Diatasnya	Unit	500,000,000
8	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Balok T	M'	275,000,000
9	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Balok T	M'	300,000,000
10	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Girder Baja	M'	325,000,000
11	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Rangka Baja	M'	350,000,000
12	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Girder Baja	M'	350,000,000
13	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Rangka Baja	M'	400,000,000

14	Pemeliharaan Berkala Jalan - MKW RAYA	Pembersihan atau Pengecoran Bahu Jalan	M'	2,000,000
15	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	Preservasi Jalan	M'	120,000,000
16	Pemeliharaan Berkala Jalan	Preservasi Jalan	M'	1,500,000,000
17	Rehabilitasi Mayor Jalan	Preservasi Jalan	M'	5,500,000,000
18	Rehabilitasi Minor Jalan	Preservasi Jalan	M'	3,500,000,000
19	Preservasi Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan + Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan + Pemeliharaan Berkala Jalan + Rehabilitasi Mayor Jalan + Rehabilitasi Minor Jalan	M'	7,000,000,000

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEKERJAAN BANGUNAN IRIGASI , NORMALISASI SUNGAI DAN PENGAMAN ABRASI PANTAI
TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	BANGUNAN IRIGASI							NORMALISASI SUNGAI		
		BENDUNG		SALURAN PRIMER		SALURAN SEKUNDER		JALAN INSPEKSI (m')	JENIS KONSTRUKSI		BRONJONG (m')
		FREE INTAKE (buah)	BENDUNG (buah)	PAS. BATU (m')	PRECAST/BE TON (m')	PAS. BATU (m')	PRECAST/BE TON (m')		PAS. BATU (m')	KONSTRUKSI BETON (m')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 20,000,000,000	Rp 34,500,000,000	Rp 3,277,500	Rp 3,450,000	Rp 2,645,000	Rp2,875,000	Rp 2,472,501	Rp 17,035,640	-	Rp 11,553,618
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN -	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17,035,870	-	Rp 11,553,618
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 20,000,000,000	Rp 34,500,000,000	-	Rp 4,025,000	-	Rp3,220,000	Rp 2,570,250	-	Rp 15,386,052	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17,035,640	-	Rp 11,553,618
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17,035,640	-	Rp 11,553,618
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	Rp 18,179,500	-	Rp 16,150,000
7	KABUPATEN SORONG	Rp 21,000,000,000	Rp 35,500,000,000	Rp 3,565,000	Rp 4,082,500	Rp 3,105,000	Rp3,450,000	Rp 2,530,000	Rp 18,241,600	-	Rp 16,540,000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 25,000,000,000	Rp 38,500,000,000	Rp 4,600,000	Rp 5,750,000	Rp 3,450,000	Rp4,025,000	Rp 3,220,000	Rp 20,930,000	-	Rp 17,100,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19,200,000	-	Rp 17,700,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17,000,000	-	Rp 15,500,000
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21,112,000	-	Rp 18,200,000
	WILAYAH BOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 40,000,000,000	Rp 70,000,000,000	Rp 5,270,000	Rp 8,000,000	Rp 4,030,000	Rp6,032,000	Rp 3,540,000	Rp 16,800,000	-	Rp 15,780,000
13	KABUPATEN KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 16,230,000	-	Rp 15,220,000

No	KABUPATEN / KOTA	PENGAMAN ABRASI PANTAI			PEMELIHARAAN IRIGASI		PEMELIHARAAN		PEMELIHARAAN ABRASI PANTAI	
		BREAK WATER (KUBUS BETON) (m')	REVTMENT (m')	TALUD (PAS. BATU) (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA									
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 25,110,000	Rp 25,090,000	Rp 12,558,368	Rp 2,123,030	Rp 4,070,312	-	Rp 7,170,321	-	Rp 2,294,018
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN -	Rp 25,231,000	Rp 25,131,000	Rp 12,581,632	-	-	-	Rp 7,500,762	-	Rp 2,486,128
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	-	-	-	Rp 4,121,200	Rp 6,113,015	-	Rp 11,030,378	-	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 25,412,000	Rp 25,213,000	Rp 12,635,796	-	-	-	Rp 11,060,339	-	Rp 2,843,096
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - II	-	-	-	-	-	-	Rp 13,200,241	-	-
	WILAYAH SORONG RAYA									
6	KOTA SORONG	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000	Rp 17,000,000	-	-	-	Rp 7,170,321	-	Rp 2,294,018
7	KABUPATEN SORONG	Rp 27,330,000	Rp 27,330,000	Rp 17,330,000	Rp 2,123,030	Rp 4,500,312	-	Rp 7,500,762	-	Rp 2,294,018
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	-	-	-	Rp 2,123,030	Rp 4,500,312	-	Rp 11,030,378	-	-
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 28,420,000	Rp 28,420,000	Rp 18,420,000	-	-	-	Rp 11,060,339	-	Rp 2,294,018
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 28,420,000	Rp 28,420,000	Rp 18,420,000	-	-	-	Rp 13,200,241	-	Rp 2,294,018
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	Rp 13,200,241	-	-
	WILAYAH BOMBERAY RAYA									
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 27,850,000	Rp 28,200,000	Rp 17,360,000	Rp 2,123,030	Rp 4,500,312	-	Rp 8,720,762	-	Rp 3,544,018
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 27,500,000	Rp 27,430,000	Rp 16,430,000	-	-	-	Rp 7,500,762	-	Rp 2,294,018

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BUREAU HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (II/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

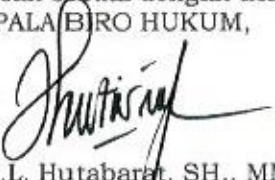
PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M'	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'19,3 MPa)1 M'
WILAYAH MANOKWARI RAYA			
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 2,950,000	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 3,182,000	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 3,200,000	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA		
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA		Rp 3,400,000
WILAYAH SORONG RAYA			
6	KOTA SORONG	Rp 2,800,000	
7	KABUPATEN SORONG	Rp 2,900,000	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN		Rp 3,405,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT		Rp 3,650,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW		Rp 4,300,000
11	KABUPATEN MAYBRAT		Rp 4,667,000
WILAYAH DOOMBERAY RAYA			
12	KABUPATEN FAKFAK		Rp 3,650,000
13	KABUPATEN KAIMANA		Rp 3,100,000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,


Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (V/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

SANITASI TAHUN 2022

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN CUBRUK	PEMBANGUNAN SEPTIC TANK
WILAYAH MANOKWARI RAYA			
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 50,000,000	Rp 70,000,000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 50,000,000	Rp 75,000,000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 60,000,000	Rp 80,000,000
WILAYAH SORONG RAYA			
6	KOTA SORONG	Rp 50,000,000	Rp 60,000,000
7	KABUPATEN SORONG	Rp 50,000,000	Rp 60,000,000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
WILAYAH DOOMBERAY RAYA			
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 55,000,000	Rp 75,000,000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. II (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

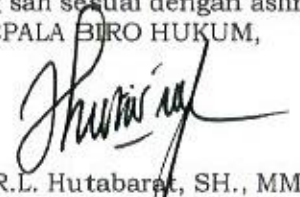
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PAGAR DAN KANDANG TERNAK TAHUN 2023

No	KABUPATEN / KOTA	KANDANG PENEDUH 1 M2	PAGAR LUAR M'	KANDANG KAMBING M2	KANDANG AYAM M2	KANDANG BABI M2
WILAYAH MANOKWARI RAYA						
1	KABUPATEN MANOKWARI	Rp 2,401,000	Rp 387,200	Rp 4,921,329	Rp 1,720,800	Rp 4,921,329
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 2,401,000	Rp 387,200	Rp 4,921,329	Rp 1,720,800	Rp 4,921,329
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 3,001,300	Rp 484,000	Rp 6,151,629	Rp 2,151,000	Rp 6,151,629
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 3,001,300	Rp 484,000	Rp 6,151,629	Rp 2,151,000	Rp 6,151,629
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 4,802,000	Rp 774,300	Rp 9,842,657	Rp 3,441,500	Rp 9,842,657
WILAYAH SORONG RAYA						
6	KOTA SORONG	Rp 2,401,000	Rp 387,200	Rp 4,921,329	Rp 1,720,800	Rp 4,921,329
7	KABUPATEN SORONG	Rp 2,401,000	Rp 387,200	Rp 4,921,329	Rp 1,720,800	Rp 4,921,329
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 3,601,500	Rp 580,800	Rp 7,381,993	Rp 2,581,200	Rp 7,381,993
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 3,601,500	Rp 580,800	Rp 7,381,993	Rp 2,581,200	Rp 7,381,993
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 3,601,500	Rp 580,800	Rp 7,381,993	Rp 2,581,200	Rp 7,381,993
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 3,601,500	Rp 580,800	Rp 7,381,993	Rp 2,581,200	Rp 7,381,993
WILAYAH DOOMBERAY RAYA						
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 3,001,300	Rp 484,000	Rp 6,151,629	Rp 2,151,000	Rp 6,151,629
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 3,001,300	Rp 484,000	Rp 6,151,629	Rp 2,151,000	Rp 6,151,629

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,


Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (V/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 TAHUN 2023**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman)	Ha	2.500.000,-	
2	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	2.000.000,-	
3	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	3.000.000,-	
4	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Hortikultura)	Ha	2.000.000,-	
5	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Hortikultura)	Ha	3.000.000,-	
6	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Perkebunan)	Ha	2.500.000,-	
7	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman Komoditas perkebunan)	Ha	4.000.000,-	
8	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Optimalisasi Lahan Padi/Jagung/Kedelai)	Ha	3.750.000,-	
9	Pengukuran Lokasi	Ha	550.000,-	
10	Pembersihan Lokasi	Ha	1.650.000,-	
11	Pemasangan Ajir	batang	1.650,-	

12	Penanaman	bibit	2.750,-	
13	Penyulaman	bibit	2.750,-	

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabara, SH., MM
 PEMBINA Tk. I (P/b)
 NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	1,352,606.8
2	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 90x90 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	1,887,743.14
3	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x180 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	12,324,615.74
4	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x240 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	14,255,859.00
5	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Portal Bentang 18 m (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	120,610,034.48
6	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	8,880,853.09
7	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	11,188,164.56
8	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 2: Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	6,251,838.61
9	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Thermoplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	3,187,436.00
10	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Coldplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	34.4985

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
11	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x10x2 cm)			
	Harga per- Buah	Buah	1	260.2407
12	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x15x2)			
	Harga per- Buah	Buah	1	267.9447
13	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)			
	Harga per- Buah	Buah	1	278.0851
14	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (Solar Cell)			
	Harga per- Buah	Buah	1	542.5827
15	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)			
	Harga per- Buah	Buah	1	52,403,274.14
16	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lurus			
	Harga per- Buah	Buah	1	32,975,876.76
17	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	39,225,876.76
18	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 3 (Tiga) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	168,600,449.16
19	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 4 (Empat) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	195,318,322.44
20	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik			
	Harga per- Buah	Buah	1	750.8853
21	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi			
	Harga per- Buah	Buah	1	595.8853
22	Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan			
	Harga per- Buah	Buah	1	4,926,332.34
23	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya			
	Harga per- Buah	Buah	1	378,732,475.95
24	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya Simpang 3			
	Harga per- Buah	Buah	1	358,094,745.95

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
25	Pengadaan & Pemasangan LPJU Konvensional			
	Harga per- Buah	Buah	1	15,045,605.14
26	Pengadaan & Pemasangan LPJU Solar Cell			
	Harga per- Buah	Buah	1	34,887,489.68
27	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 2 : Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	10,061,216.76

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
 PEMBINA Tk. I (IV/b)
 NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

ASDP DAN KEPELABUHANAN

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
ASDP				
1	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pekerjaan Persiapan	Paket	1	1,400,802,029.44
2	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Causeway (108.72 M2)	M2	1	592,031,298.75
3	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Trestle (432,25 M2)	M2	1	3,799,536,297.11
4	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Trestle / Abutment	Buah	1	514,996,032
5	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Moveable Bridge	Buah	1	2,295,926,887
6	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Mooring Dolphin	Buah	1	2,844,706,987
7	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Breasting Dolphin	Buah	1	13,967,451,492
8	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan Hidrolik	Buah	1	2,281,134,562
9	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Pelindung MB	Buah	1	1,459,428,586
10	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Catwalk	m2	1	524,912,950
11	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan dan Ruang Kontrol	Buah	1	230,479,221
12	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Rumah Kontrol	M2	1	110,890,713
13	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembuatan Jalan dan Lapangan Penetrasi Dengan Kolakan (L=2.150 M2, TEBAL = 7 CM)	M2	1	130,815,489
14	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembangunan Moveable Bridge	M2	1	5,022,656,083
15	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Hidrolik	Paket	1	6,192,061,431
16	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Lampu Penerangan	Paket	1	325,665,200

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
Kepelabuhanan				
17	Pembangunan Causeway (100 m x 5 m) t : 3m	m2	1	5,935,476.00
18	Pembangunan Talud (t=2 m) (5 m')	m'	1	10,887,348.00
19	Pembangunan Talud (t=2,1 m sd 3,5 m) (5 m')	m'	1	17,317,458.00
20	Pembangunan Talud (t=3,6 m sd 5 m) (5 m')	m'	1	29,660,262.00
21	Pengaspalan Lapangan Parkir (30 m x 25 m)	m2	1	1,808,821.00
22	Pengaspalan Lapangan Penumpukan (30 m x 25 m)	m2	1	1,703,764.00
23	Pengaspalan Jalan Pelabuhan (100 m x 5 m)	m2	1	1,840,240.00
24	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	17,766,630.00
25	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	12,866,971.00
26	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	16,236,842.00
27	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	11,593,370.00
28	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	m3	1	320,932.00
29	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =4.016 m3/hari	m3	1	54,600.00
30	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 3,264	m3	1	67.20
31	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil) Kap.Produksi = 2,752	m3	1	79.70
32	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil) Kap. Produksi =1,936 m3 / hari	m3	1	113,300.00
33	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =5.823 m3 /hari	m3	1	44,800.00
34	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 4.773 m3/hari	m3	1	55,100.00
35	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 3.990 m3/hari	m3	1	65,400.00
36	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi =2.807 m3 /hari	m3	1	93,000.00

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
37	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil)Kap. Produksi =8.032 m3 /hari	m3	1	43,200.00
38	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil)Kap.Produksi = 6.528 m3 /hari	m3	1	53,200.00
39	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 5.504 m3 /hari	m3	1	63,100.00
40	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi= 3.872 m3 /hari	m3	1	89,700.00
41	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≤ 6Nmil)Kap. Produksi = 1.800 m3 /hari	m3	1	54,100.00
42	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 6 < DA ≤12 Nmil)Kap. Produksi = 1.376 m3 /hari	m3	1	70,700.00
43	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 12 < DA≤ 16 Nmil)Kap. Produksi = 1.176 m3 /hari	m3	1	82,800.00
44	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≥ 16Nmil)Kap. Produksi= 856 m3 /hari	m3	1	113,700.00
45	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2000	mil	1	1,015,500.00
46	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2900	mil	1	1,198,300.00
47	Mobilisasi Kapal Type TSHD 4000	mil	1	1,520,900.00
48	Mobilisasi Kapal Type Clamshell Digandeng dengan Tug Boat 2 x 1000 PK	mil	1	1,352,800.00
49	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	4,472,137,272.00
50	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	6,531,733,206.00
51	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	1,679,847,903.00
52	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	3,814,755,167.00
53	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	1,247,941,001.00
54	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	2,234,259,878.00
55	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	986,958,410.00
56	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	877,333,665.00
57	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	821,342,791.00
58	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Konstruksi BajaGalvanis)	Paket	1	992,795,904.00

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
59	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	1,041,199,765.00
60	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Beton)	Paket	1	1,086,574,581.00
61	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	832,636,576.00
62	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	737,460,808.00
63	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	658,591,000.00
64	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	1,002,521,125.00
65	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	957,588,765.00
66	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	927,701,765.00
67	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	Paket	1	27,728,498,335.69
68	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000	Paket	1	332,392,416.16
70	Pengadaan Bus Air Roro 30 pax type Katamaran 14 meter (DAK)	unit	1	9,590,945,000.00

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRU HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (P/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PERKERETAAPIAN

No	NAMA PEKERJAAN	unit	Volume	Harga Satuan
1	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	3,390,559
2	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	3,037,069
3	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	3,508,706
4	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	kereta	1	47,621,147,249
5	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penyandang Cacat	kereta	1	4,012,231,762
6	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Dilengkapi Fasilitas Penyandang Cacat	kereta	1	3,999,011,035
7	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	25,649,474,962
8	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	81,404,182,571
9	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	paket	1	42,325,157,997
10	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	3,082,325,978
11	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	2,760,971,584
12	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	3,189,732,631

13	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	unit	1	4,329,224,771
14	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penumpang Cacat	unit	1	3,635,464,576
15	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	74,003,802,336
16	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	23,317,704,510
17	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	gardu	1	38,477,416,360

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

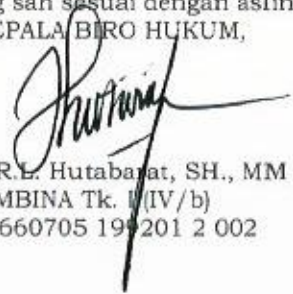
KEBANDARUDARAAN

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
1	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 7,5 Cm (m2)	m2	1	195.22056
2	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 5 Cm	m2	1	120.58051
3	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 7,5 Cm	m2	1	212.90405
4	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 5 Cm	m2	1	137.00724
5	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	282.41929
6	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 5 Cm	m2	1	184.39325
7	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	245.59916
8	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 5 Cm	m2	1	170.0394
9	Pekerjaan Pelapisan Apron/ Runway/Taxiway Dengan Cement Treated Base Course (CTBC), Tebal = 25 Cm	m2	1	249.8994
10	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Beton Semen (Rigit Pavement) Tebal = 35 Cm	m2	1	2.337.976,85
11	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	957.14512
12	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	924.90539
13	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal KolakanTebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	635.9201
14	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Kolakan Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	868.80015
15	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	618.23661

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
16	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	543.59655
17	Pekerjaan Pengecatan / Marking	m2	1	74.02029
18	Pengadaan dan Pemasangan Garbarata	paket	1	12.139.656.600,00
19	Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Walk Through Metal Detector (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Asuransi)	paket	1	110.725.910,00
20	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cabin	paket	1	1.861.575.750,00
21	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Bagasi	paket	1	2.801.775.750,00
22	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cargo	paket	1	4.667.775.750,00
23	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cargo Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	956.775.750,00
24	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	715.575.750,00
25	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cabin Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	639.575.750,00
26	Pemasangan / Instalasi Jaringan FIDS	paket	1	290.557.778,03
27	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)2500x45 PA(Led)	paket	1	6.270.984.732,61
28	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA(Led)	paket	1	5.483.769.606,56
29	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA	paket	1	5.447.769.606,56
30	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 NPA	paket	1	4.963.313.391,23
31	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30 (led)	paket	1	5.263.277.087,84
32	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30	paket	1	5.227.277.087,84
33	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30	paket	1	5.005.407.354,14
34	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30 (led)	paket	1	5.041.407.354,14

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
35	Pengadaan dan Pemasangan RTIL (Runway Threshold Identification Light)	paket	1	724.882.240,09
36	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 1 Ujung 1 Sisi	paket	1	964.668.826,84
37	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 2 Ujung 1 Sisi	paket	1	1.780.050.255,38
38	Pengadaan dan Pemasangan MALS (mediumintensity approach lighting system)	paket	1	2.085.686.450,30
39	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL (dengan inset)	paket	1	8.184.276.934,36
40	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL	paket	1	8.064.173.067,16
41	Pengadaan dan Pemasangan PIDS	paket	1	571.312.000,00
42	Pengadaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCT)	paket	1	763.577.000,00
43	Pengadaan dan Pemasangan Access Door	paket	1	126.174.100,00

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,


Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. II (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

JASA KONSULTASI

HARGA BARANG DAN JASA

NO	SUB KEGIATAN	KUALITAS	SATUAN	STANDART HARGA	IKK MANOKWARI	JUMLAH HARGA
1	Perencanaan FS/DED/SID/RIP/Masterplan/Studi					
	Perencanaan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1.00	Paket			200,000,000.00
2	Pengawasan					
	Pengawasan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1.00	Paket			627,165,000.00

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
 PEMBINA Tk. I (IV/b)
 NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**KETENAGALISTRIKAN
 TAHUN 2023**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Jaringan Listrik Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Unit	4,288,500	
2	Jaringan Listrik Pedesaan (JTM)	KMS	744,900,000	
3	Jaringan Listrik Pedesaan (JTR)	KMS	520,267,000	
4	Jaringan Listrik PJJ	Tiang	21,275,000	
5	Pemeliharaan PJJ Tenaga Surya	Paket	108,000,000	
6	Pemeliharaan PLTS Terpusat 2MW	Paket	21,560,000	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
 PEMBINA Tk. I/IV/b)
 NIP. 19660705 199201 2 002

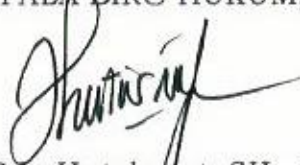
LAMPIRAN XX
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAK) TAHUN 2023

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembangunan/Rehabilitasi Turap Penahan Tanah (<i>revetment</i>)	meter kubik	5,200,000	DAK
2	Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga	meter persegi	36,000,000	DAK
3	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase	meter	1,500,000	DAK
4	Pembangunan/rehabilitasi Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP)	paket	1,000,000,000	DAK
5	Rehabilitasi TPI Higenis Pelabuhan Perikanan (PP)	meter ²	6,500,000	DAK
6	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo)	paket	1,000,000,000	DAK
7	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur Pelabuhan Perikanan (PP)	paket	497,625,000	DAK
8	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon	Meter persegi	2,100,000	DAK
9	Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon	Meter persegi	4,200,000	DAK
10	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang	Meter	1,680,000	DAK
11	Pembangunan Saluran Air Pasok dan/atau Buang	Meter	3,220,000	DAK

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
12	Pengadaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk	Paket	84,000,000	DAK
13	Pengadaan Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi (Alat Selam, GPS dan Camera Underwater) Kawasan Konservasi	Paket	420,000,000	DAK
14	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi	Paket	980,000,000	DAK
15	Pengadaan Speedboat Kawasan Konservasi	Unit	1,000,000,000	DAK
16	Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS	paket	35,000,000	DAK

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XXI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**JARINGAN INTERNET DAN WEBSITE
TAHUN 2023**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Material & Jasa Instalasi Jaringan Fiber Optik 24 core	km	175,000,000	
2	Material & Jasa Instalasi ruang data center & NOC	set	60,000,000	
3	Material & Jasa Instalasi ruang smart Government	Gedung (5 ruangan)	25,000,000	
4	Pembangunan Sistem Informasi Kabupaten/Kota (Website)	Unit	15,000,000	
5	Pembangunan Sistem Counter Surveilancer	Unit	2,180,171,600	Rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara
6	Pembangunan Tower Triangle	Unit	273,114,000	

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN XXII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**PERANGKAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP (DAK)
TAHUN 2023**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan Spectrophotometer UV VIS	Paket	350,000,000	DAK

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, SH., MM
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW